ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN

SKRIPSI

OLEH

SITI MARDHIYAH ULFA
NPM : 148330130

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018

ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area

OLEH

SITI MARDHIYAH ULFA
148330130

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018

Judul Skripsi	: Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Pada Dinas Perhubungan Kota Medan
Nama	: Siti Mardhiyah Ulfa
NPM	: 148330130
Program Studi	: Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh

Komisi Pembimbing

Drs.Zainal Abidin, MH
Pembimbing I

Warsani Purnama Sari, SE, Ak, CA, MM
Pembimbing II

Dr.Ihsan Effendi, SE, M.Si
Dekan

Ilham Ramadhan Nasution, SE, Ak, M.Si, CA
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 04 Oktober 2018

UNIVERSITAS MEDAN AREA

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip hasil karya dari orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulis ilmiah.

Saya bersedia menerima pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 04Oktober 2018

METERAI TEMPEL
62428AFF563209666
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Siti Mardhiyah Ulfa
148330130

UNIVERSITAS MEDAN AREA

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Siti Mardhiyah Ulfa
NPM	: 148330130
Program Studi	: Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya	: Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pada Dinas Perhubungan Kota Medan** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksekutif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan dana (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 04 Oktober 2018
Yang menyatakan

(Siti Mardhiyah Ulfa)
148330130

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Pada tanggal 12 Desember 1996 dari Ayah Wahyudianto dan Ibu Maimunah. Penulis merupakan putri kandung ke 1 dari 2 bersaudara. Tahun 2014 penulis lulus dari SMA Dharma Pancasila Medan dan pada tahun 2014 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

ABSTRACT

This study aims to analyze the budget realization to assess the effectiveness and efficiency of performance at the Medan City Transportation Agency in 2015-2017. The type of research used by the author is descriptive research. The population and sample in this study are reports on the realization of the 2015-2017 budget at the Medan City Transportation Agency. The types of data used in this study are quantitative and qualitative data. The data source used by researchers is secondary data. Data collection techniques used in this study are documentation and interview techniques. Analysis Techniques The data used by the researcher is a descriptive technique. The results of this study indicate that the development of the level of effectiveness of the budget realization in the Medan City Transportation Agency in 2015-2017 is said to be ineffective because the realization of the budget achieved is still very much the difference to meet the set budget targets, while the development of the level of efficiency of budget realization at the Medan City Transportation Agency 2015-2017 is still said to be quite efficient. This shows that the performance at the Medan City Transportation Agency in 2015-2017 has not yet reached the specified target.

Keywords : **Budget Realization Analysis, Effectiveness and Efficiency**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realisasi anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Medan tahun 2015-2017. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif. Populasi dan Sampel dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran tahun 2015-2017 yang ada di Dinas Perhubungan Kota Medan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Sumber data yang digunakan peneliti adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik Analisis Data yang digunakan si peneliti adalah teknik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, perkembangan tingkat efektivitas realisasi anggaran di Dinas Perhubungan Kota Medan tahun 2015-2017 dikatakan tidak efektif disebabkan oleh realisasi anggaran yang dicapai masih sangat jauh perbedaannya untuk memenuhi target anggaran yang ditetapkan, sedangkan perkembangan tingkat efisiensi realisasi anggaran di Dinas Perhubungan Kota Medan tahun 2015-2017 masih dikatakan cukup efisien. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja di Dinas Perhubungan Kota Medan tahun 2015-2017 belum mencapai target yang ditentukan.

Kata Kunci : Analisis Realisasi Anggaran, Efektifitas dan Efisiensi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan KaruniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Medan."** sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penulisan ini merupakan persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menerima bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Menyadari akan hal tersebut, maka dengan segala ketulusan dan kerendahan hati melalui lembaran halaman ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teristimewa Orang Tua saya, Ayahanda Wahyudianto dan Ibunda Maimunah yang telah membesarkan, mendidik, memberikan semangat dan pengorbanan yang tulus dengan diiringi doa kepada Allah sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ke perguruan tinggi agar menjadi anak yang berbakti kepada agama dan negara dan juga untuk adik tersayang Ahmad Fadhli.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan,M.Eng,M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

3. Bapak Dr. Ihsan Effendi,SE,MSi selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
4. Bapak Ilham Ramadhan Nasution,SE,Ak,M.Si,CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
5. Bapak Drs. Zainal Abidin,MH selaku dosen pembimbing I telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Warsani Purnama Sari,SE,Ak,CA,MM selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Ibu Hasbiana Dalimunthe,SE,M.Ak selaku sekretaris yang telah banyak meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan kearah yang lebih baik dan semangat selama ini.
8. Pimpinan dan seluruh staf pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan yang turut membantu dan memotivasi kepada peneliti.
9. Sahabat – sahabat RENBOUKEK tersayang Ulfah Indahsari S.Ak, R.Fatimah Ayu Azhar S.Ak, Malida Shafira S.Ak, Wardatul Hubby Hsb, Merry Mona Sri Yanti, Nurul Rahmi Sandya, dan sahabat BFF Nurmaini S.Ak, Putri Agustin Rahardi S.Ak, Indah Rahmayani S.Ak, Suci Febri H Lubis S.Ak, Geovani Aurora Purba yang selalu setia menemani, memberi masukan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

10. Teman teman baik seperjuangan stambuk 2014 pagi khususnya Grup B Universitas Medan Area yang tidak bisa penulis tulis semuanya disini yang telah memberikan dukungan dan kenangan manis, suka dan duka yang akan penulis kenang sampai nanti.
11. Buat seluruh Pengurus HIMAKSI yang selalu mendukung dan memotivasi penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan dari semua pihak yang dapat membangun kesempurnaan dari skripsi ini. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini agar dapat bermanfaat bagi pembaca, dan semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua.

Medan, Juli 2018

Siti Mardhiyah Ulfa

NPM 148330130

UNIVERSITAS MEDAN AREA

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **vi**

DAFTAR GAMBAR ..... **viii**

DAFTAR TABEL ..... **ix**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **x**

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah 3

1.3 Tujuan Penelitian 3

1.4 Manfaat Penelitian 4

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori-Teori 5

2.1.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik 5

2.1.2 Laporan Realisasi Anggaran Publik & Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Publik 15

2.1.3 Pengertian Efektivitas & Efisiensi Kinerja Anggaran Sektor Publik 21

2.1.4 Manfaat Realisasi Anggaran Sektor Publik 22

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2.2 Penelitian Terdahulu..... . 23

2.3 Kerangka Konseptual 25

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian 26

3.2 Populasi dan Sampel 27

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian 28

3.4 Jenis dan Sumber Data 29

3.5 Teknik Pengumpulan Data 30

3.6 Teknik Analisis Data 30

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data 34

4.2 Hasil Penelitian 40

4.3 Pembahasan 46

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan..... 48

5.2 Saran..... 48

DAFTAR PUSTAKA 50

LAMPIRAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 : Format laporan Realisasi Anggaran Publik 20

Gambar II.2 : Kerangka Konseptual 25

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan 36

UNIVERSITAS MEDAN AREA

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu 23

Tabel III.1 : Waktu Penelitian..... 27

Tabel IV.1 : Laporan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Dinas Perhubungan Kota Medan 40

Tabel IV.2 : Laporan Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja Dinas Perhubungan Kota Medan 41

Tabel IV.3 : Tingkat Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kota Medan 42

Tabel IV.4 : Tingkat Efisiensi Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kota Medan 44

UNIVERSITAS MEDAN AREA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kota Medan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang. Anggaran publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap – tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik masyarakat.

Anggaran publik merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh publik, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja lembaga/organisasi pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan publik. Laporan realisasi anggaran merupakan jenis laporan keuangan daerah yang lebih dahulu dihasilkan sebelum kemudian diisyaratkan untuk membuat laporan neraca dan laporan arus kas.

Anggaran dalam sektor publik merupakan tulang punggung (*back-bone*) penyelenggaraan pemerintahan. Usaha pemerintah daerah dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang ada tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan keuangan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

suatu perusahaan merupakan salah satu bentuk informasi yang dapat disampaikan secara relevan apabila menggunakan sistem yang tepat pula, hal tersebut sangat bermanfaat bagi perusahaan, terutama bagi para pengambil keputusan harus dapat menentukan segala sesuatunya dengan efektif bagi kelangsungan hidup perusahaan.

Efisiensi dan Efektivitas sangat penting dalam pengukuran atau perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan serta terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai. Menurut (Mahmudi 2011:22), Efisiensi terkait dengan hubungan antara *output* berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut. Sedangkan, efektivitas (hasil guna) merupakan dukungan antara pengeluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai, pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau paket kebijakan.

Penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi pada Dinas Perhubungan Kota Medan lebih ditekankan pada penilaian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dibuat setiap tahun anggaran. Penilaian kinerja melalui LAKIP hanya bertumpu pada *output* yang diperoleh oleh Dinas Perhubungan Kota Medan dengan membandingkan rencana yang ingin dicapai tanpa memperhatikan *outcome*. Dengan demikian LAKIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi publik tersebut.

Berdasarkan penjelasan kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Renward Parapat mengaku dalam hal pengelolaan parkir instansi kinerjanya dalam keadaan buruk. Hal ini terungkap dalam rapat yang membahas tunggakan retribusi parkir dan realisasi program kerja Dishub Medan tahun 2017. Dan berdasarkan data alokasi APBD 2017 di Dinas Perhubungan Kota Medan sebesar Rp. 61 M lebih setelah P-APBD bertambah Rp. 2,5 M lebih. Sedangkan penggunaan anggaran itu pada bulan September 2017 masih 38 persen, target PAD sebesar Rp. 44 M lebih hingga saat ini yang terealisasi masih 52% atau Rp. 23,3 M.(*gosumut.com*).

Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Medan masih belum mampu menempatkan anggaran yang sesuai, sehingga masih banyak hal – hal yang seharusnya diperbaiki serta ditindak lanjuti sebagai program kerja yang lebih baik. Namun, terkait dengan hal ini Dinas Perhubungan Kota Medan masih belum terlihat efektif serta efisien dalam merealisasikan anggarannya. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul **"Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektifitas Dan Efisiensi Kinerja Pada Dinas Perhubungan Kota Medan".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah "**Apakah kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Medan dalam merealisasikan anggaran sudah berjalan efektif dan efisien ?**"

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam kegiatan penelitian ini adalah **"untuk mengetahui apakah realisasi anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Medan sudah berjalan efektif"**.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1.4.1 **Bagi Peneliti,** diharapkan dapat menambah wawasan pengetahun tentang merealisasikan anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Medan.

1.4.2 **Bagi Peneliti Lain,** diharapkan sebagai bahan perbandingan dan pengembangan penelitian lebih lanjut untuk penelitian selanjutnya, serta dijadikan bahan kepustakaan yang akan memberikan kontribusi pemikiran dan masukan yang positif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori - Teori

2.1.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik

1. Anggaran Sektor Publik

Anggaran Sektor Publik adalah perencanaan finansial tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang dengan melihat data yang diperoleh dari masa lalu sebagai acuan penetapan anggaran. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Karena pada sektor publik anggaran harus diinformasikan kepada publik untuk di kritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Penggunaan anggaran pada sektor publik sebagai alat penuntun bagi perencanaan dan pengendalian sumber daya, baik itu keuangan atau sebaliknya.

Sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu bangsa. Kegagalan pada sektor publik dapat berdampak pada terganggunya sektor bisnis dan sosial yang dapat memicu kondisi krisis suatu bangsa. Oleh karena itu, pembangunan sektor publik harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak boleh diabaikan.

Mardiasmo (2009:62) anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

belanja, dan aktifitas. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktifitas dalam satuan moneter. Pada sektor publik, anggaran harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik.

Anggaran sebagai salah satu alat bantu manajemen memegang peranan penting karena dengan anggaran manajemen dapat merencanakan, mengatur, dan mengevaluasi jalannya suatu kegiatan. Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang (Nafarin, 2012:19). Sedangkan pengertian anggaran menurut "*Commite on Governmental Accounting*" yang dikutip oleh (Haruman, 2010:6) anggaran adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Menurut Indra Bastian (2010;166) Anggaran mempunyai karakteristik sebagai berikut:

a. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan.
b. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satuan atau beberapa tahun.
c. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

d. Usulan anggaran telah disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyususunan anggaran.

e. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

2. Fungsi Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu:

a. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan (*Planning Tool*)

Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berupa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

1) merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan,
2) merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya,
3) mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun,
4) menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

b. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (*Control Tool*)

Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.

Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya *overspending*, *underspending* dan salah sasaran dalam pengalokasian anggaran dalam bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu:

1) Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan,
2) Menghitung selisih anggaran (*favourable* dan *unfavourable variances*),
3) Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (controllable) dan tak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) atas suatu varians,
4) Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.

c. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (*Fiscal Tool*)

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

d. Anggaran Sebagai Alat Politik (*Political Tool*)

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan

dana publik untuk kepentingan tertentu. Dalam pembuatan anggaran publik membutuhkan *political skill*, *coalition building*, keahlian bernegosiasi dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik.

e. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (*Coordination and Communication Tool*)

Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi.

f. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja (*Performance Measurement Tool*)

Anggaran merupakan wujud komitmen dari *budget holder* (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai, dikaitkan dengan anggaran yang ditetapkan.

g. Anggaran Sebagai Alat Motivasi (*Motivation Tool*)

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan staffnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat *challenging but attainable* atau *demanding but*

achieveable maksudnya target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.

h. Anggaran Sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik (*Public Share*)

Fungsi ini hanya berlaku pada organisasi swasta anggaran merupakan dokumen rahasia yang tertutup untuk publik. Masyarakat dan elemen masyarakat lainnya non publik, seperti LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Keagamaan, dan organisasi masyarakat lainnya, harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Keterlibatan mereka dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Keterlibatan langsung masyarakat dalam proses penganggaran dapat dilakukan mulai dari proses penyusunan perencanaan pembangunan maupun rencana kinerja publik (daerah), sedangkan keterlibatan secara tidak langsung dapat melalui perwakilan mereka di lembaga legislatif (DPR/DPRD).

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1. Pengertian APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana penerimaan dan pengeluaran daerah yang meliputi rencana pendapatan, belanja, bagi hasil, cadangan, dan pembiayaan yang disetujui oleh DPRD dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (PERDA). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan

pemerintahdaerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara).

Menurut Mahsun (2011:81), Definisi anggaran pendapatan dan belanja daerah juga merupakan daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran belanja daerah selama satu tahun. APBD merupakan rencana kerja kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukan adanyasumber penerimaan yang merupakan target minimal dan beban yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran (Halim,2012:10).

Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari

dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut.

Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

APBD terdiri dari anggaran pendapatan dan pembiayaan, pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain. Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus, kemudian pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat. Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

2. Fungsi APBD

Fungsi APBD jika ditinjau dari kebijakan fiskal yaitu:

a. Fungsi otorisasi yaitu bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

b. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
c. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
d. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
e. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
f. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

3. Tujuan APBD

Setiap tahun pemerintah daerah menyusun APBD. Tujuan penyusunan APBD adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan daerah agar terjadi keseimbangan yang dinamis, dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan di daerah demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

Pada akhirnya, semua itu ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spiritual bedasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta untuk mengatur pembelanjaan daerah dan penerimaan daerah agar tercapai kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah secara merata.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No. 32 tahun 2004 Pendapatan Daerah, adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah menurut UU No.32 tahun 2004, terdiri dari:

a. Pendapatan Asli daerah (PAD), berasal dari: Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

b. Dana Perimbangan, merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

c. Lain - lain pendapatan daerah yang sah adalah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana Perimbangan meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

5. Belanja Daerah

Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2014 belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

2.1.2 Laporan Realisasi Anggaran Publik

1. Pengertian Laporan Realisasi Anggaran Publik

Laporan realisasi anggaran yang disebut dengan LRA merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan yang terdiri atas unsur pendapatan dan belanja.

Laporan realisasi anggaran yang disusun dalam laporan keuangan akan dijelaskan secara rinci dalam suatu catatan atas laporan keuangan. Penjelasan tersebut akan memuat informasi-informasi yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka - angka yang perlu diberikan penjelasan lebih lanjut.

Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan

pemerintah pusat dan daerah serta resiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Selain itu, laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, sesuai dengan anggaran yang ditetapkan serta sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran Publik

Tujuan standar laporan realisasi anggaran adalah mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan dan menetapkan dasar – dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintahan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan. Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target – target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksikan sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah. Laporan tersebut juga memprediksi resiko ketidakpastian dari sumber – sumber daya ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan pemerintah tersebut. Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi

kepada para pengguna laporan tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan :

a. Telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan hemat.
b. Telah sesuai dengan anggarannya.
c. Telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

3. Komponen Laporan Realisasi Anggaran Publik

1. Pendapatan LRA

Pendapatan negara/daerah merupakan iuran rakyat yang diamanatkan kepada Pemerintah, sehingga pendapatan LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah.

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada rekening kas umum Negara/Daerah. Pembukuan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto, dan tidak diperbolehkan mencatat notenyanamun ketika biaya atas pendapatan tersebut bersifat variabel dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka dapat mencatat nilai netonya.

2. Belanja

Belanja adalah pengurangan ekuitas dana lancar pemerintah untuk pengeluaran yang ditetapkan dalam dokumen otoritas kredit

anggaran (*allotment*). Belanja disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.

Pembayaran belanja dapat dilakukan secara langsung atau melalui dana kas kecil yang diberikan kepada para bendahara pengeluaran. Pembayaran diberikan langsung kepada yang berhak jika jumlah, peruntukan, dan penerimanya sudah pasti. Dana kas kecil digunakan pemerintah untuk membayar keperluan sehari – hari kantor. Pada dasarnya pemerintah menggunakan sistem dana tetap.

Jika terjadi kekeliruan dalam pengeluaran belanja maka koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurangan belanja pada periode yang sama.

3. Surplus /Defisit - LRA

Surplus – LRA adalah selisih lebih antara pendapatan – LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit – LRA adalah selesih kurang antara pendapatan – LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit – LRA. Perhitungan surplus/defisit – LRA dilakukan di tingkat pemerintah pusat atau daerah melalui jurnal penutup pada saat dilakukan proses konsolidasi.

4. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun bertahun – tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran publik terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan kas daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi publik, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan pihak ketiga, dan penjualan investasi permanen lainnya. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat uang diterima pada rekening Kas Umum Negara/Daerah, dan dicatat berdasarkan asas bruto. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Umum Negara/Daerah.

5. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

Selisih lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. SiLPA/SiKPA diperoleh dari penutupan akun Surplus/Defisit dan pembiayaan neto pada akhir tahun anggaran, untuk selanjutnya dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

4. Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Publik

- o -

LAMPIRAN I.A.5
PERATURAN PEMERINTAH RI
NOMOR 8 TAHUN 2006
TANGGAL 3 APRIL 2006

ILUSTRASI FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	20X1			20X0
		Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
53					
54	**BELANJA TAK TERDUGA**				
55	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
56	**Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55)**	xxx	xxx	xx	xxx
57	**JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)**	xxxx	xxxx	xx	xxxx
58					
59	**TRANSFER**				
60	**TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA**				
61	Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
62	Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx	xx	xxx
63	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
64	**JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63)**	xxxx	xxxx	xx	xxxx
65	**JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64)**	xxxx	xxxx	xxx	xxxx
66	**SURPLUS/DEFISIT (33 - 65)**	xxxx	xxxx	xxx	xxxx
67					
68	**PEMBIAYAAN**				
69					
70	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**				
71	Penggunaan SiLPA	xxx	xxx	xx	xxx
72	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
73	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
74	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
75	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
76	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
77	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
78	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
79	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
80	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
81	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
82	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
83	**Jumlah Penerimaan (71 s/d 82)**	xxxx	xxxx	xx	xxxx
84					
85	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**				
86	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
87	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
88	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
91	**Jumlah Pengeluaran (86 s/d 90)**	xxx	xxx	xx	xxx
92	**PEMBIAYAAN NETO (83 - 91)**	xxxx	xxxx	xx	xxxx
93					
94	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (66-92)**	xxxx	xxxx	xx	xxxx

Gambar II.1

Format Laporan Realisasi Anggaran Publik

2.1.3 Pengertian Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Anggaran Sektor Publik

1. Pengertian Efektivitas Kinerja Anggaran Sektor Publik

Efektivitas kinerja anggaran sektor publik adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah di terapkan. Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir dari suatu pelayanan dikaitkan dengan outputnya (*cost of outcome*).

Menurut Mahmudi (2011:22) efektivitas (hasil guna) merupakan dukungan antara pengeluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau paket kebijakan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran aktif kebijakan.

Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dan keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin kontribusi output yang dihasilkan berperan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Pengukuran efektivitas bisa dilakukan hanya dengan mengukur *outcome*.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran penerimaan target dengan anggaran penerimaan dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{rasio efektivitas} = \frac{\text{realisasi penerimaan PAD}}{\text{anggaran penerimaan PAD}} \text{x}100\%$$

2. Pengetian Efisiensi Kinerja Anggaran Sektor Publik

Efisiensi kinerja anggaran sektor publik diukur dengan rasio antara *output* dan *input*. Pengukuran efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas, pengukuran efesiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Efisiensi kinerja anggaran sektor publik lebih bersifat relatif.

Menurut Raharjo (2011:169) mengemukakan bahwa efisiensi merupakan suatu kondisi atau keadaan, dimana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan dengan penuh kemampuan yang dimiliki. Secara sistematis, efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dan *input* atau dengan istilah lain *output* per unit *input*.

Efisiensi berarti tingkat pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu. Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut.

$$\boldsymbol{rasio\ efisiensi = \frac{realisasi\ belanja}{anggaran\ belanja} x100\%}$$

2.1.4 Manfaat Analisis Realisasi Anggaran Sektor Publik

1. Menyediakan informasi mengenai sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.

2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
3. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara kompharatif.

   Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi : telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, dan telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel II.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Kiky Muryanti (2017)	Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Wonogiri Tahun Anggaran 2011-2015	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan keuangannya sangat efektif dan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan efisien.

2.	Abdurrohman Wiro Handoko (2014)	Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Berbasis Kinerja Pada Dispenda Kota Surabaya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Dispenda Kota Surabaya dalam tingkat efektif dan efisien pada tahun 2011-2012
3.	Ariel Sharon Sumenge (2013)	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran belanja BAPPEDA Minahasa Selatan 2008-2011 dikatakan efektif dan efisien

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada tempat penelitian dan sampel penelitian yang diteliti.

Pada penelitian sebelumnya menjelaskan tentang :

1. Kiky Muryanti (2017), "Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Wonogiri Tahun Anggaran 2011-2015".

   Peneliti ini menggunakan sampel penelitian anggaran selama 5 tahun.
2. Abdurrohman Wiro Handoko(2014), "Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Berbasis Kinerja Pada Dispenda Kota Surabaya".

   Peneliti ini menggunakan sampel penelitian anggaran selama 2 tahun.
3. Ariel Sharon Sumenge (2013), "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan".

   Peneliti ini menggunakan sampel penelitian anggaran selama 4 tahun.

Sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang :

Siti Mardhiyah Ulfa (2018), "Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pada Dinas Perhubungan Kota Medan".

Sampel penelitian peneliti ini menggunakan sampel anggarannya selama 3 tahun.

2.3 Kerangka Konseptual

Definisi kerangka konseptual menurut FASB (*Financial Accounting Standards Board*) adalah suatu sistem yang koheren dari hubungan antara tujuan dan fundamental yang dapat mendorong standar yang konsisten dan yang menjelaskan sifat, fungsi serta keterbatasan akuntansi dan laporan keuangan. Penelitian ini akan mengulas tentang permasalahan realisasi anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja, yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar II.2

Kerangka Konseptual

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2012:11) : "penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik suatu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain".

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Medan Jl. Pinang Baris No. 114, Lalang, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20127. Telp. (061) 6618313.

3.1.3 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018. Rincian kegiatan dapat dilihat pada tabel III.1 dibawah ini:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Tabel III.1
Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	2018							
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt
1.	Pengajuan judul Skripsi								
2.	Pembuatan Proposal								
3.	Bimbingan Proposal								
4.	Seminar Proposal								
5.	Pengumpulan Data & Analisis Data								
6.	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi								
7.	Seminar Hasil								
8.	Sidang Meja Hijau								

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Nanang Martono (2011:74) "Populasi merupakan keseluruhan objek atau subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat – syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti". Berdasarkan pendapat diatas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota Medan.

3.2.2 Sampel

Menurut Nanang Martono (2011:74) "Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri – ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti,

sampel dapat didefinisikan sebagai anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi". Sampel dalam penelitian ini adalah Realisasi Anggaran tahun 2015-2017 yang ada di Dinas Perhubungan Kota Medan.

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi Operasional adalah definisi yang dibuat spesifik sesuai dengan kriteria pengujian atau pengukuran,dibentuk dengan cara mencari indikator empiris konsep. Jadi pengertian yang biasa didapatkan dari definisi tersebut adalah bahwa di dalam sebuah penelitian ada sesuatu yang memang menjadi sasaran, misalnya variabel itu tadi. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.3.1 Laporan Realisasi Anggaran Sektor Publikadalah Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan yang terdiri atas unsur pendapatan dan belanja.

3.3.2 Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sektor Publik, Efektivitas kinerja anggaran sektor publik adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir dari suatu pelayanan dikaitkan dengan outputnya (*cost of outcome*). Efisiensi kinerja anggaran sektor publik lebih bersifat relatif. Pengukuran efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas, pengukuran efesiensi dilakukan dengan menggunakan

perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan.

3.4 Jenis Data dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Menurut Kuncoro (2009)jenis data terbagi dua macam yaitu: data kualitatif adalah yang berbentuk dekskriptif atau uraian lain dan pengukurannya tidak dapat menggunakan skala numerik, data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sehingga untuk bisa dilakukan pemrosesan statistik, bentuk penelitian kualitatif harus disajikan dalam angka – angka (kualitatif yang dikuantitatifkan).

3.4.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Menurut Sugiyono (2012:141) bahwa data sekunder adalah "sumber data yang diperoleh dengan membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen resmi yang dikeluarkan oleh dinas terkait". Peneliti menggunakan data sekunder karena peneliti mengumpulkan informasi dari data yang telah diolah oleh pihak yang berwenang dalam bentuk dokumen seperti laporan realisasi anggaran dan data lain yang diperlukan dalam penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam usaha pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

3.5.1 Teknik Wawancara

Menurut Sugiyono (2013:231) bahwa "Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu" yaitu penulis melakukan tanya jawab kepada pihak yang terkait dan berwenang di Dinas Perhubungan Kota Medan tentang realisasi anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja.

3.5.2 Teknik Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:240) "Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu". Jadi penulis juga melakukan pengumpulan informasi dari data akuntansi, dokumen-dokumen dan catatan seperti laporan realisasi anggaran dan data lainnya yang diperlukan pada Dinas Perhubungan Kota Medan.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. Analisis data menurut Sugiyono (2013:244) adalah "proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah

dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain". Analisis ini dilakukan dengan cara menganalisis, menafsirkan, dan mengolah data pada Dinas Perhubungan Kota Medan, sehingga dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu analisis realisasi anggaran untuk menilai efektifitas dan efisiensi kinerja.

3.6.1 **Analisis Efektivitas**

Menurut Mardiasmo (2009:132) Efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spendingwisely*). Indikator efektifitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program.

Efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan publik dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi *riil*. Kinerja sektor publik dikatakan efektif apabila rasio antara 90,01% s/d 100%, semakin tinggi rasio efektivitas berarti kinerja akan semakin baik dan semakin rendah rasio efektivitas berarti semakin buruk (Yunianti, 2015). Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan

realisasi anggaran penerimaan dengan target anggaran penerimaan dengan rumus sebagai berikut:

$$\boldsymbol{rasio\ efektivitas = \frac{realisasi\ penerimaan\ PAD}{anggaran\ penerimaan\ PAD} x100\%}$$

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka pendapatan dikatakan sangat efektif.
2. Jika hasil perbandingan mencapai 100%, maka pendapatan dikatakan efektif.
3. Jika hasil perbandingan mencapai 90-99%, maka pendapatan dikatakan cukup efektif.
4. Jika hasil perbandingan mencapai 75-89%, maka pendapatan dikatakan kurang efektif.
5. Jika hasil perbandingan mencapai dibawah 75%, maka pendapatan dikatakan tidak efektif.

3.6.2 **Analisis Efisiensi**

Efisiensi adalah hubungan antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*), efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi perangkat publik dapat tercapai

manfaat tertentu. *Input* adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. *Output* adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik. Efisiensi berarti tingkat pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu. Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut:

$$\boldsymbol{rasio\ efisiensi = \frac{realisasi\ belanja}{anggaran\ belanja} x100\%}$$

Kriteria analisis rasio efisiensi dapat dikategorikan sebagai berikut.

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
2. Jika hasil perbandingan mencapai 90-100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.
3. Jika hasil perbandingan mencapai 80-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien.
4. Jika hasil perbandingan mencapai 60-80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
5. Jika hasil perbandingan mencapai dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Ariel Sharon Sumenge.2013. **Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan**. Jurnal EMBA. Vol. 1 No 3 September 2013. Hal. 74-81. Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Bastian, Indra. 2010. **Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga**. Erlangga: Jakarta

Haruman dan Sri Rahayu. 2010. "**Penyusunan Anggaran**". Edisi Pertama, Salemba Empat : Jakarta.

Halim, Abdul dan Kusufi. 2012. **Akuntansi Keuangan Daerah**. Edisi 4. Selemba Empat : Jakarta.

Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. **Akuntansi Sektor Publik**. Edisi 2. Salemba Empat : Jakarta.

Julita dan Jufrizen, (2012). **Budgeting**. Penerbit Citapustaka Media Perintis. Bandung.

Kiky Muryanti.2017. **Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Wonogiri Tahun Anggaran 2011-2015**. Universitas Muhammadiyah, Surakarta.

Mahmudi. 2011. **Akuntansi Sektor Publik,** Cetakan Pertama. UUI Press. Yogyakarta

Mahsun, Moh., Firma Sulistyowati & Heribertus Andre Purwanugraha. 2011. **Akuntansi Sektor Publik**, BPFE: Yogyakarta.

Mardiasmo. 2009. **Akuntansi Sektor Publik**. Andi. Yogyakarta.

Martono, Nanang. 2011. **Metode Penelitian Kuantitatif**. PT Raya Grafindo Persada. Jakarta.

Nafarin. 2012. "Penganggaran Rencana Kerja Perusahaan". Edisi Kesatu. Salemba Empat : Jakarta.

Rahardjo, Adisasmita (2011**), Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah**, Cetakan Pertama, Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.

Roland Gerald Tooy, David Paul, Elia Saerang, Lidia Mawikere.2016. **Analisis Efisiensi dan Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan (BAPPELITBANG) Kabupaten Minahasa Utara**. Jurnal Berkala Ilmiah

Efisiensi. Volume 16 No. 04 tahun 2016. Hal 659 – 671. Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Sugiyono.2012. **Metode Penelitian Bisnis**. Alfabeta. Bandung.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

PEMERINTAH KOTA MEDAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2015

Urusan Pemerintahan : 1.07 Urusan Wajib Perhubungan
Unit Organisasi : 1.07 . 1.07.01 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 1.07 . 1.07.01 . 01 Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	**PENDAPATAN - LRA**	44.108.500.000,00	0,00	28.115.795.750,00	28.115.795.750,00	(15.992.704.250,00)
4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA**	44.108.500.000,00	0,00	28.115.795.750,00	28.115.795.750,00	(15.992.704.250,00)
4 . 1 . 2	**Pendapatan Retribusi Daerah - LRA**	44.108.500.000,00	0,00	28.115.795.750,00	28.115.795.750,00	(15.992.704.250,00)
4 . 1 . 2 . 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	26.318.600.000,00	0,00	19.882.116.000,00	19.882.116.000,00	(6.436.484.000,00)
4 . 1 . 2 . 05 . 01	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	26.318.600.000,00	0,00	19.882.116.000,00	19.882.116.000,00	(6.436.484.000,00)
4 . 1 . 2 . 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	9.365.000.000,00	0,00	5.798.191.000,00	5.798.191.000,00	(3.566.809.000,00)
4 . 1 . 2 . 07 . 03	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LRA	9.365.000.000,00	0,00	5.798.191.000,00	5.798.191.000,00	(3.566.809.000,00)
4 . 1 . 2 . 15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	660.000.000,00	0,00	211.175.250,00	211.175.250,00	(448.824.750,00)
4 . 1 . 2 . 15 . 04	Kendaraan Bermotor - LRA	660.000.000,00	0,00	211.175.250,00	211.175.250,00	(448.824.750,00)
4 . 1 . 2 . 18	Retribusi Terminal - LRA	5.500.000.000,00	0,00	1.818.941.000,00	1.818.941.000,00	(3.681.059.000,00)
4 . 1 . 2 . 18 . 01	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LRA	5.500.000.000,00	0,00	1.818.941.000,00	1.818.941.000,00	(3.681.059.000,00)
4 . 1 . 2 . 19	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	1.650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.650.000.000,00)
4 . 1 . 2 . 19 . 01	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LRA	1.650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.650.000.000,00)
4 . 1 . 2 . 29	Retribusi Izin Trayek - LRA	614.900.000,00	0,00	405.372.500,00	405.372.500,00	(209.527.500,00)
4 . 1 . 2 . 29 . 01	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LRA	614.900.000,00	0,00	405.372.500,00	405.372.500,00	(209.527.500,00)
5	**BELANJA**	115.185.823.000,00	0,00	102.941.606.939,70	102.941.606.939,70	(12.244.216.060,30)
5 . 1	**BELANJA OPERASI**	95.029.520.000,00	0,00	85.083.740.880,70	85.083.740.880,70	(9.945.779.119,30)
5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	43.178.923.000,00	0,00	40.700.025.568,00	40.700.025.568,00	(2.478.897.432,00)
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	27.319.883.000,00	0,00	27.191.236.068,00	27.191.236.068,00	(128.646.932,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	20.960.893.000,00	0,00	20.879.207.392,00	20.879.207.392,00	(81.685.608,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Belanja Tunjangan Keluarga	2.301.974.000,00	0,00	2.294.092.030,00	2.294.092.030,00	(7.881.970,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Belanja Tunjangan Jabatan	238.937.000,00	0,00	237.995.000,00	237.995.000,00	(942.000,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Belanja Tunjangan Fungsional	17.733.000,00	0,00	17.655.000,00	17.655.000,00	(78.000,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	1.191.702.000,00	0,00	1.186.990.000,00	1.186.990.000,00	(4.712.000,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Belanja Tunjangan Beras	1.456.519.000,00	0,00	1.450.145.520,00	1.450.145.520,00	(6.373.480,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	453.302.000,00	0,00	452.335.342,00	452.335.342,00	(966.658,00)

Printed By SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3 . 09 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	5.969.453.000,00	0,00	4.630.396.359,00	4.630.396.359,00	(1.339.056.641,00)
5 . 2 . 4	**Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**	986.250.000,00	0,00	833.499.000,00	833.499.000,00	(152.751.000,00)
5 . 2 . 4 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	840.000.000,00	0,00	833.499.000,00	833.499.000,00	(6.501.000,00)
5 . 2 . 4 . 01 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	840.000.000,00	0,00	833.499.000,00	833.499.000,00	(6.501.000,00)
5 . 2 . 4 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	78.250.000,00	0,00	0,00	0,00	(78.250.000,00)
5 . 2 . 4 . 02 . 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Penyeberangan	78.250.000,00	0,00	0,00	0,00	(78.250.000,00)
5 . 2 . 4 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 4 . 06 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 4 . 21	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	68.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(68.000.000,00)
5 . 2 . 4 . 21 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	68.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(68.000.000,00)
5 . 2 . 5	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	1.774.450.000,00	0,00	1.600.500.000,00	1.600.500.000,00	(173.950.000,00)
5 . 2 . 5 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	43.200.000,00	0,00	0,00	0,00	(43.200.000,00)
5 . 2 . 5 . 01 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	43.200.000,00	0,00	0,00	0,00	(43.200.000,00)
5 . 2 . 5 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan	1.731.250.000,00	0,00	1.600.500.000,00	1.600.500.000,00	(130.750.000,00)
5 . 2 . 5 . 02 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Laporan	1.731.250.000,00	0,00	1.600.500.000,00	1.600.500.000,00	(130.750.000,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(71.077.323.000,00)	0,00	(74.825.811.189,70)	(74.825.811.189,70)	(3.748.488.189,70)
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(71.077.323.000,00)	0,00	(74.825.811.189,70)	(74.825.811.189,70)	(3.748.488.189,70)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2	**BELANJA MODAL**	20.156.303.000,00	0,00	17.857.866.059,00	17.857.866.059,00	(2.298.436.941,00)
5 . 2 . 2	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	1.329.950.000,00	0,00	1.069.627.600,00	1.069.627.600,00	(260.322.400,00)
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	113.000.000,00	0,00	96.755.000,00	96.755.000,00	(16.245.000,00)
5 . 2 . 2 . 15 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	58.000.000,00	0,00	57.380.000,00	57.380.000,00	(620.000,00)
5 . 2 . 2 . 15 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	55.000.000,00	0,00	39.375.000,00	39.375.000,00	(15.625.000,00)
5 . 2 . 2 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	91.200.000,00	0,00	67.517.400,00	67.517.400,00	(23.682.600,00)
5 . 2 . 2 . 16 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	91.200.000,00	0,00	67.517.400,00	67.517.400,00	(23.682.600,00)
5 . 2 . 2 . 16 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	187.500.000,00	0,00	179.075.000,00	179.075.000,00	(8.425.000,00)
5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	22.500.000,00	0,00	20.925.000,00	20.925.000,00	(1.575.000,00)
5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	135.000.000,00	0,00	129.300.000,00	129.300.000,00	(5.700.000,00)
5 . 2 . 2 . 17 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	30.000.000,00	0,00	28.850.000,00	28.850.000,00	(1.150.000,00)
5 . 2 . 2 . 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	350.000.000,00	0,00	208.840.000,00	208.840.000,00	(141.160.000,00)
5 . 2 . 2 . 19 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	350.000.000,00	0,00	208.840.000,00	208.840.000,00	(141.160.000,00)
5 . 2 . 2 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(50.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena Penerima VHF	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(50.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	538.250.000,00	0,00	517.440.200,00	517.440.200,00	(20.809.800,00)
5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	538.250.000,00	0,00	517.440.200,00	517.440.200,00	(20.809.800,00)
5 . 2 . 3	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	16.065.653.000,00	0,00	14.354.239.459,00	14.354.239.459,00	(1.711.413.541,00)
5 . 2 . 3 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.164.450.000,00	0,00	2.147.111.000,00	2.147.111.000,00	(17.339.000,00)
5 . 2 . 3 . 01 . 17	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Stasiun Bus	2.164.450.000,00	0,00	2.147.111.000,00	2.147.111.000,00	(17.339.000,00)
5 . 2 . 3 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	13.901.203.000,00	0,00	12.207.128.459,00	12.207.128.459,00	(1.694.074.541,00)
5 . 2 . 3 . 09 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	7.931.750.000,00	0,00	7.576.732.100,00	7.576.732.100,00	(355.017.900,00)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 1 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	94.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(94.500.000,00)
5 . 1 . 2 . 07 . 05	Belanja Akomodasi/Penginapan	12.000.000,00	0,00	2.944.500,00	2.944.500,00	(9.055.500,00)
5 . 1 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00	(750.000,00)
5 . 1 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00	(750.000,00)
5 . 1 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	57.570.000,00	0,00	47.390.000,00	47.390.000,00	(10.180.000,00)
5 . 1 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	55.950.000,00	0,00	47.390.000,00	47.390.000,00	(8.560.000,00)
5 . 1 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.620.000,00)
5 . 1 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.532.675.000,00	0,00	1.341.882.800,00	1.341.882.800,00	(190.792.200,00)
5 . 1 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.532.675.000,00	0,00	1.341.882.800,00	1.341.882.800,00	(190.792.200,00)
5 . 1 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	76.125.000,00	0,00	0,00	0,00	(76.125.000,00)
5 . 1 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	76.125.000,00	0,00	0,00	0,00	(76.125.000,00)
5 . 1 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	89.750.000,00	0,00	48.743.000,00	48.743.000,00	(41.007.000,00)
5 . 1 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	0,00	18.200.000,00	18.200.000,00	(31.800.000,00)
5 . 1 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.750.000,00	0,00	30.543.000,00	30.543.000,00	(9.207.000,00)
5 . 1 . 2 . 18	Belanja Pemeliharaan	19.067.875.000,00	0,00	17.861.921.740,00	17.861.921.740,00	(1.205.953.260,00)
5 . 1 . 2 . 18 . 03	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	2.511.300.000,00	0,00	2.431.859.000,00	2.431.859.000,00	(79.441.000,00)
5 . 1 . 2 . 18 . 06	Belanja Pemeliharaan	16.534.075.000,00	0,00	15.408.063.740,00	15.408.063.740,00	(1.126.011.260,00)
5 . 1 . 2 . 18 . 10	Belanja pemeliharaan komputer	22.500.000,00	0,00	21.999.000,00	21.999.000,00	(501.000,00)
5 . 1 . 2 . 19	Belanja Jasa Konsultansi	1.060.454.000,00	0,00	512.039.000,00	512.039.000,00	(548.415.000,00)
5 . 1 . 2 . 19 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	397.494.000,00	0,00	124.575.000,00	124.575.000,00	(272.919.000,00)
5 . 1 . 2 . 19 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	556.960.000,00	0,00	381.464.000,00	381.464.000,00	(175.496.000,00)
5 . 1 . 2 . 19 . 04	Belanja Jasa Konsultan Perorangan	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(80.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 19 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	26.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	(20.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 20 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	102.500.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	(95.500.000,00)
5 . 1 . 2 . 23 . 01	Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	100.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	(93.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 23 . 02	Belanja Sosialisasi	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.500.000,00)
5 . 1 . 2 . 25	Belanja Honorarium PNS	4.115.160.000,00	0,00	3.326.120.000,00	3.326.120.000,00	(789.040.000,00)
5 . 1 . 2 . 25 . 01	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.964.680.000,00	0,00	3.224.575.000,00	3.224.575.000,00	(740.105.000,00)
5 . 1 . 2 . 25 . 02	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	121.540.000,00	0,00	83.865.000,00	83.865.000,00	(37.675.000,00)
5 . 1 . 2 . 25 . 05	Belanja Honorarium Pengelola Barang	7.040.000,00	0,00	5.280.000,00	5.280.000,00	(1.760.000,00)
5 . 1 . 2 . 25 . 07	Belanja Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	21.900.000,00	0,00	12.400.000,00	12.400.000,00	(9.500.000,00)
5 . 1 . 2 . 26	Belanja Honorarium Non PNS	19.583.730.000,00	0,00	17.176.162.102,00	17.176.162.102,00	(2.407.567.898,00)
5 . 1 . 2 . 26 . 02	Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	19.583.730.000,00	0,00	17.176.162.102,00	17.176.162.102,00	(2.407.567.898,00)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Belanja Pembulatan Gaji	600.000,00	0,00	401.348,00	401.348,00	(198.652,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	645.728.000,00	0,00	643.365.936,00	643.365.936,00	(2.362.064,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	52.495.000,00	0,00	29.048.500,00	29.048.500,00	(23.446.500,00)
5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	13.653.615.000,00	0,00	13.508.789.500,00	13.508.789.500,00	(144.825.500,00)
5 . 1 . 1 . 02 . 01	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	12.379.425.000,00	0,00	12.264.969.500,00	12.264.969.500,00	(114.455.500,00)
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif	1.274.190.000,00	0,00	1.243.820.000,00	1.243.820.000,00	(30.370.000,00)
5 . 1 . 1 . 06	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2.205.425.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.205.425.000,00)
5 . 1 . 1 . 06 . 33	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2.205.425.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.205.425.000,00)
5 . 1 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	51.850.597.000,00	0,00	44.383.715.312,70	44.383.715.312,70	(7.466.881.687,30)
5 . 1 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.077.537.000,00	0,00	916.271.250,00	916.271.250,00	(161.265.750,00)
5 . 1 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	531.037.000,00	0,00	415.181.500,00	415.181.500,00	(115.855.500,00)
5 . 1 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	500.000.000,00	0,00	499.589.750,00	499.589.750,00	(410.250,00)
5 . 1 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(45.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	143.500.000,00	0,00	119.600.000,00	119.600.000,00	(23.900.000,00)
5 . 1 . 2 . 02 . 19	Belanja Bahan-bahan Pengecetan	143.500.000,00	0,00	119.600.000,00	119.600.000,00	(23.900.000,00)
5 . 1 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.300.180.000,00	0,00	738.137.485,70	738.137.485,70	(562.042.514,30)
5 . 1 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.000.000,00	0,00	1.979.205,00	1.979.205,00	(4.020.795,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	36.000.000,00	0,00	16.186.892,70	16.186.892,70	(19.813.107,30)
5 . 1 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	240.000.000,00	0,00	178.965.368,00	178.965.368,00	(61.034.632,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	390.000.000,00	0,00	266.375.620,00	266.375.620,00	(123.624.380,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(300.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 17	Belanja Dokumentasi dan Publikasi	5.180.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.180.000,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	128.500.000,00	0,00	83.220.000,00	83.220.000,00	(45.280.000,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Interior Ruangan	194.500.000,00	0,00	191.410.400,00	191.410.400,00	(3.089.600,00)
5 . 1 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.985.500.000,00	0,00	827.828.535,00	827.828.535,00	(1.157.671.465,00)
5 . 1 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	338.500.000,00	0,00	305.944.035,00	305.944.035,00	(32.555.965,00)
5 . 1 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.647.000.000,00	0,00	521.884.500,00	521.884.500,00	(1.125.115.500,00)
5 . 1 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.424.291.000,00	0,00	1.343.799.900,00	1.343.799.900,00	(80.491.100,00)
5 . 1 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.390.750.000,00	0,00	1.341.299.900,00	1.341.299.900,00	(49.450.100,00)
5 . 1 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	16.392.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	(13.892.000,00)
5 . 1 . 2 . 06 . 04	Belanja Penjilidan	11.549.000,00	0,00	0,00	0,00	(11.549.000,00)
5 . 1 . 2 . 06 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan lainnya	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.600.000,00)
5 . 1 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	212.250.000,00	0,00	96.069.500,00	96.069.500,00	(116.180.500,00)
5 . 1 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	105.750.000,00	0,00	93.125.000,00	93.125.000,00	(12.625.000,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	

UNIVERSITAS MEDAN AREA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

PEMERINTAH KOTA MEDAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016

Urusan Pemerintahan : 1.07 Urusan Wajib Perhubungan
Unit Organisasi : 1.07 . 1.07.01 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 1.07 . 1.07.01 . 01 Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	**PENDAPATAN - LRA**	44.108.500.000,00	0,00	29.049.405.000,00	29.049.405.000,00	(15.059.095.000,00)
4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA**	44.108.500.000,00	0,00	29.049.405.000,00	29.049.405.000,00	(15.059.095.000,00)
4 . 1 . 2	**Pendapatan Retribusi Daerah - LRA**	44.108.500.000,00	0,00	29.049.405.000,00	29.049.405.000,00	(15.059.095.000,00)
4 . 1 . 2 . 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	26.318.600.000,00	0,00	20.872.643.000,00	20.872.643.000,00	(5.445.957.000,00)
4 . 1 . 2 . 05 . 01	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	26.318.600.000,00	0,00	20.872.643.000,00	20.872.643.000,00	(5.445.957.000,00)
4 . 1 . 2 . 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	9.365.000.000,00	0,00	6.274.575.000,00	6.274.575.000,00	(3.090.425.000,00)
4 . 1 . 2 . 07 . 03	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LRA	9.365.000.000,00	0,00	6.274.575.000,00	6.274.575.000,00	(3.090.425.000,00)
4 . 1 . 2 . 15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	660.000.000,00	0,00	158.775.500,00	158.775.500,00	(501.224.500,00)
4 . 1 . 2 . 15 . 01	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA	660.000.000,00	0,00	158.775.500,00	158.775.500,00	(501.224.500,00)
4 . 1 . 2 . 18	Retribusi Terminal - LRA	5.500.000.000,00	0,00	1.363.281.000,00	1.363.281.000,00	(4.136.719.000,00)
4 . 1 . 2 . 18 . 01	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LRA	5.500.000.000,00	0,00	1.363.281.000,00	1.363.281.000,00	(4.136.719.000,00)
4 . 1 . 2 . 19	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	1.650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.650.000.000,00)
4 . 1 . 2 . 19 . 01	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LRA	1.650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.650.000.000,00)
4 . 1 . 2 . 29	Retribusi Izin Trayek - LRA	614.900.000,00	0,00	380.130.500,00	380.130.500,00	(234.769.500,00)
4 . 1 . 2 . 29 . 01	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LRA	614.900.000,00	0,00	380.130.500,00	380.130.500,00	(234.769.500,00)
5	**BELANJA**	120.628.125.920,00	0,00	110.666.511.804,61	110.666.511.804,61	(9.961.614.115,39)
5 . 1	**BELANJA OPERASI**	96.762.475.920,00	0,00	87.686.345.404,61	87.686.345.404,61	(9.076.130.515,39)
5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	47.050.204.000,00	0,00	43.269.855.865,00	43.269.855.865,00	(3.780.348.135,00)
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	31.261.629.000,00	0,00	28.815.052.865,00	28.815.052.865,00	(2.446.576.135,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	23.807.351.000,00	0,00	22.764.479.120,00	22.764.479.120,00	(1.042.871.880,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Belanja Tunjangan Keluarga	2.611.492.000,00	0,00	2.285.805.864,00	2.285.805.864,00	(325.686.136,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Belanja Tunjangan Jabatan	302.301.000,00	0,00	238.915.000,00	238.915.000,00	(63.386.000,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Belanja Tunjangan Fungsional	23.327.000,00	0,00	15.750.000,00	15.750.000,00	(7.577.000,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	1.335.274.000,00	0,00	1.165.720.000,00	1.165.720.000,00	(169.554.000,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Belanja Tunjangan Beras	1.809.775.000,00	0,00	1.426.743.160,00	1.426.743.160,00	(383.031.840,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	405.331.000,00	0,00	111.227.359,00	111.227.359,00	(294.103.641,00)

Printed By SimDa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Belanja Pembulatan Gaji	1.000.000,00	0,00	371.861,00	371.861,00	(628.139,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	792.562.000,00	0,00	648.314.697,00	648.314.697,00	(144.247.303,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	173.216.000,00	0,00	157.725.804,00	157.725.804,00	(15.490.196,00)
5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	13.583.150.000,00	0,00	13.381.820.000,00	13.381.820.000,00	(201.330.000,00)
5 . 1 . 1 . 02 . 01	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	12.272.400.000,00	0,00	12.141.400.000,00	12.141.400.000,00	(131.000.000,00)
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif	1.310.750.000,00	0,00	1.240.420.000,00	1.240.420.000,00	(70.330.000,00)
5 . 1 . 1 . 06	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2.205.425.000,00	0,00	1.072.983.000,00	1.072.983.000,00	(1.132.442.000,00)
5 . 1 . 1 . 06 . 33	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2.205.425.000,00	0,00	1.072.983.000,00	1.072.983.000,00	(1.132.442.000,00)
5 . 1 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	49.712.271.920,00	0,00	44.416.489.539,61	44.416.489.539,61	(5.295.782.380,39)
5 . 1 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.025.935.445,00	0,00	882.075.300,00	882.075.300,00	(143.860.145,00)
5 . 1 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	435.935.445,00	0,00	384.930.300,00	384.930.300,00	(51.005.145,00)
5 . 1 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	500.000.000,00	0,00	497.145.000,00	497.145.000,00	(2.855.000,00)
5 . 1 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(90.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	(13.200.000,00)
5 . 1 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	(13.200.000,00)
5 . 1 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.055.550.000,00	0,00	1.116.317.604,61	1.116.317.604,61	(939.232.395,39)
5 . 1 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	24.000.000,00	0,00	620.412,00	620.412,00	(23.379.588,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	36.000.000,00	0,00	18.927.350,61	18.927.350,61	(17.072.649,39)
5 . 1 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	315.000.000,00	0,00	167.877.466,00	167.877.466,00	(147.122.534,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	614.000.000,00	0,00	280.377.484,00	280.377.484,00	(333.622.516,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service	975.000.000,00	0,00	612.187.392,00	612.187.392,00	(362.812.608,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	91.550.000,00	0,00	36.327.500,00	36.327.500,00	(55.222.500,00)
5 . 1 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.489.000.000,00	0,00	269.148.800,00	269.148.800,00	(1.219.851.200,00)
5 . 1 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	400.000.000,00	0,00	269.148.800,00	269.148.800,00	(130.851.200,00)
5 . 1 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.089.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.089.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.233.592.875,00	0,00	3.072.358.600,00	3.072.358.600,00	(161.234.275,00)
5 . 1 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.407.250.000,00	0,00	1.354.934.100,00	1.354.934.100,00	(52.315.900,00)
5 . 1 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	14.640.500,00	0,00	0,00	0,00	(14.640.500,00)
5 . 1 . 2 . 06 . 04	Belanja Penjilidan	11.115.000,00	0,00	0,00	0,00	(11.115.000,00)
5 . 1 . 2 . 06 . 05	Belanja dokumentasi dan publikasi	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 06 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan lainnya	1.790.587.375,00	0,00	1.717.424.500,00	1.717.424.500,00	(73.162.875,00)
5 . 1 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	32.250.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	(20.250.000,00)
5 . 1 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	15.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	(3.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	17.250.000,00	0,00	0,00	0,00	(17.250.000,00)

Printed By SimDa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 1 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	60.500.000,00	0,00	48.312.500,00	48.312.500,00	(12.187.500,00)
5 . 1 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52.500.000,00	0,00	48.312.500,00	48.312.500,00	(4.187.500,00)
5 . 1 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(8.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	281.300.000,00	0,00	280.000.000,00	280.000.000,00	(1.300.000,00)
5 . 1 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	281.300.000,00	0,00	280.000.000,00	280.000.000,00	(1.300.000,00)
5 . 1 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	282.975.000,00	0,00	271.577.845,00	271.577.845,00	(11.397.155,00)
5 . 1 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	282.975.000,00	0,00	271.577.845,00	271.577.845,00	(11.397.155,00)
5 . 1 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	470.000.000,00	0,00	462.715.000,00	462.715.000,00	(7.285.000,00)
5 . 1 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	470.000.000,00	0,00	462.715.000,00	462.715.000,00	(7.285.000,00)
5 . 1 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 2 . 18	Belanja Pemeliharaan	14.093.961.000,00	0,00	13.709.547.950,00	13.709.547.950,00	(384.413.050,00)
5 . 1 . 2 . 18 . 06	Belanja Pemeliharaan	14.093.961.000,00	0,00	13.709.547.950,00	13.709.547.950,00	(384.413.050,00)
5 . 1 . 2 . 19	Belanja Jasa Konsultansi	784.853.000,00	0,00	528.720.000,00	528.720.000,00	(256.133.000,00)
5 . 1 . 2 . 19 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 2 . 19 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	172.000.000,00	0,00	113.024.000,00	113.024.000,00	(58.976.000,00)
5 . 1 . 2 . 19 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	534.353.000,00	0,00	415.696.000,00	415.696.000,00	(118.657.000,00)
5 . 1 . 2 . 19 . 04	Belanja Jasa Konsultan Perorangan	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(72.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 19 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(6.500.000,00)
5 . 1 . 2 . 23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	50.000.000,00	0,00	48.059.000,00	48.059.000,00	(1.941.000,00)
5 . 1 . 2 . 23 . 01	Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	50.000.000,00	0,00	48.059.000,00	48.059.000,00	(1.941.000,00)
5 . 1 . 2 . 25	Belanja Honorarium PNS	4.208.145.000,00	0,00	3.123.870.000,00	3.123.870.000,00	(1.084.275.000,00)
5 . 1 . 2 . 25 . 01	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.796.650.000,00	0,00	2.976.975.000,00	2.976.975.000,00	(819.675.000,00)
5 . 1 . 2 . 25 . 02	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	173.395.000,00	0,00	58.540.000,00	58.540.000,00	(114.855.000,00)
5 . 1 . 2 . 25 . 07	Belanja Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	238.100.000,00	0,00	88.355.000,00	88.355.000,00	(149.745.000,00)
5 . 1 . 2 . 26	Belanja Honorarium Non PNS	21.631.009.600,00	0,00	20.591.786.940,00	20.591.786.940,00	(1.039.222.660,00)
5 . 1 . 2 . 26 . 02	Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	21.631.009.600,00	0,00	20.591.786.940,00	20.591.786.940,00	(1.039.222.660,00)
5 . 1 . 2 . 27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 1 . 2 . 27 . 02	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2	**BELANJA MODAL**	23.865.650.000,00	0,00	22.980.166.400,00	22.980.166.400,00	(885.483.600,00)
5 . 2 . 2	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	6.870.594.000,00	0,00	6.474.277.000,00	6.474.277.000,00	(396.317.000,00)
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	3.701.500.000,00	0,00	3.628.920.000,00	3.628.920.000,00	(72.580.000,00)
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur /Test Klinis Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 11 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	3.701.500.000,00	0,00	3.628.920.000,00	3.628.920.000,00	(72.580.000,00)
5 . 2 . 2 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	25.000.000,00	0,00	20.660.000,00	20.660.000,00	(4.340.000,00)
5 . 2 . 2 . 12 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	25.000.000,00	0,00	20.660.000,00	20.660.000,00	(4.340.000,00)
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	358.322.000,00	0,00	163.030.000,00	163.030.000,00	(195.292.000,00)
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	75.000.000,00	0,00	74.130.000,00	74.130.000,00	(870.000,00)
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	90.000.000,00	0,00	88.900.000,00	88.900.000,00	(1.100.000,00)
5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	193.322.000,00	0,00	0,00	0,00	(193.322.000,00)
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	305.372.000,00	0,00	254.090.000,00	254.090.000,00	(51.282.000,00)
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	100.000.000,00	0,00	99.100.000,00	99.100.000,00	(900.000,00)
5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	46.872.000,00	0,00	0,00	0,00	(46.872.000,00)
5 . 2 . 2 . 15 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	97.500.000,00	0,00	97.050.000,00	97.050.000,00	(450.000,00)
5 . 2 . 2 . 15 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	61.000.000,00	0,00	57.940.000,00	57.940.000,00	(3.060.000,00)
5 . 2 . 2 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	178.200.000,00	0,00	162.168.000,00	162.168.000,00	(16.032.000,00)
5 . 2 . 2 . 16 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	178.200.000,00	0,00	162.168.000,00	162.168.000,00	(16.032.000,00)
5 . 2 . 2 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	1.675.000.000,00	0,00	1.645.577.000,00	1.645.577.000,00	(29.423.000,00)
5 . 2 . 2 . 18 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	1.675.000.000,00	0,00	1.645.577.000,00	1.645.577.000,00	(29.423.000,00)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	182.000.000,00	0,00	159.832.000,00	159.832.000,00	(22.168.000,00)
5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	182.000.000,00	0,00	159.832.000,00	159.832.000,00	(22.168.000,00)
5 . 2 . 2 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	445.200.000,00	0,00	440.000.000,00	440.000.000,00	(5.200.000,00)
5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan	445.200.000,00	0,00	440.000.000,00	440.000.000,00	(5.200.000,00)
5 . 2 . 3	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	16.995.056.000,00	0,00	16.505.889.400,00	16.505.889.400,00	(489.166.600,00)
5 . 2 . 3 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.445.800.000,00	0,00	2.204.260.000,00	2.204.260.000,00	(241.540.000,00)
5 . 2 . 3 . 01 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.550.000.000,00	0,00	1.517.200.000,00	1.517.200.000,00	(32.800.000,00)
5 . 2 . 3 . 01 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	895.800.000,00	0,00	687.060.000,00	687.060.000,00	(208.740.000,00)
5 . 2 . 3 . 08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	49.000.000,00	0,00	48.365.600,00	48.365.600,00	(634.400,00)
5 . 2 . 3 . 08 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	49.000.000,00	0,00	48.365.600,00	48.365.600,00	(634.400,00)
5 . 2 . 3 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	14.500.256.000,00	0,00	14.253.263.800,00	14.253.263.800,00	(246.992.200,00)
5 . 2 . 3 . 09 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	8.539.037.000,00	0,00	8.400.783.000,00	8.400.783.000,00	(138.254.000,00)
5 . 2 . 3 . 09 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	5.961.219.000,00	0,00	5.852.480.800,00	5.852.480.800,00	(108.738.200,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(76.519.625.920,00)	0,00	(81.617.106.804,61)	(81.617.106.804,61)	(5.097.480.884,61)
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(76.519.625.920,00)	0,00	(81.617.106.804,61)	(81.617.106.804,61)	(5.097.480.884,61)

Printed By SimDa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

PEMERINTAH KOTA MEDAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 January s.d 31 December 2017

Urusan Pemerintahan : 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
Unit Organisasi : 2.09 . 2.09.01 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.09 . 2.09.01 . 01 Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	**PENDAPATAN - LRA**	55.108.500.000,00	0,00	26.050.706.000,00	26.050.706.000,00	(29.057.794.000,00)
4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA**	55.108.500.000,00	0,00	26.050.706.000,00	26.050.706.000,00	(29.057.794.000,00)
4 . 1 . 2	**Pendapatan Retribusi Daerah - LRA**	55.108.500.000,00	0,00	26.050.706.000,00	26.050.706.000,00	(29.057.794.000,00)
4 . 1 . 2 . 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	41.818.600.000,00	0,00	19.744.361.583,00	19.744.361.583,00	(22.074.238.417,00)
4 . 1 . 2 . 05 . 01	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	41.818.600.000,00	0,00	19.744.361.583,00	19.744.361.583,00	(22.074.238.417,00)
4 . 1 . 2 . 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	9.365.000.000,00	0,00	5.535.474.500,00	5.535.474.500,00	(3.829.525.500,00)
4 . 1 . 2 . 07 . 03	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LRA	9.365.000.000,00	0,00	5.535.474.500,00	5.535.474.500,00	(3.829.525.500,00)
4 . 1 . 2 . 15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	660.000.000,00	0,00	102.349.000,00	102.349.000,00	(557.651.000,00)
4 . 1 . 2 . 15 . 01	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA	660.000.000,00	0,00	102.349.000,00	102.349.000,00	(557.651.000,00)
4 . 1 . 2 . 18	Retribusi Terminal - LRA	1.000.000.000,00	0,00	272.310.000,00	272.310.000,00	(727.690.000,00)
4 . 1 . 2 . 18 . 01	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LRA	1.000.000.000,00	0,00	272.310.000,00	272.310.000,00	(727.690.000,00)
4 . 1 . 2 . 19	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	1.650.000.000,00	0,00	121.667.417,00	121.667.417,00	(1.528.332.583,00)
4 . 1 . 2 . 19 . 01	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LRA	1.650.000.000,00	0,00	121.667.417,00	121.667.417,00	(1.528.332.583,00)
4 . 1 . 2 . 29	Retribusi Izin Trayek - LRA	614.900.000,00	0,00	274.543.500,00	274.543.500,00	(340.356.500,00)
4 . 1 . 2 . 29 . 01	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LRA	614.900.000,00	0,00	274.543.500,00	274.543.500,00	(340.356.500,00)
5	**BELANJA**	112.099.879.060,00	0,00	100.057.056.457,22	100.057.056.457,22	(12.042.822.602,78)
5 . 1	**BELANJA OPERASI**	98.155.566.060,00	0,00	88.177.688.345,22	88.177.688.345,22	(9.977.877.714,78)
5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	48.389.981.000,00	0,00	43.884.080.056,00	43.884.080.056,00	(4.505.900.944,00)
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	28.474.516.000,00	0,00	27.787.503.294,00	27.787.503.294,00	(687.012.706,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	22.679.744.000,00	0,00	22.154.265.600,00	22.154.265.600,00	(525.478.400,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Belanja Tunjangan Keluarga	2.232.827.000,00	0,00	2.183.670.855,00	2.183.670.855,00	(49.156.145,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Belanja Tunjangan Jabatan	243.466.000,00	0,00	231.065.000,00	231.065.000,00	(12.401.000,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Belanja Tunjangan Fungsional	22.992.000,00	0,00	17.513.402,00	17.513.402,00	(5.478.598,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	1.146.546.000,00	0,00	1.116.145.000,00	1.116.145.000,00	(30.401.000,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Belanja Tunjangan Beras	1.377.474.000,00	0,00	1.341.797.760,00	1.341.797.760,00	(35.676.240,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	20.769.000,00	0,00	10.910.153,00	10.910.153,00	(9.858.847,00)

Printed By Sim03

UNIVERSITAS MEDAN AREA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Belanja Pembulatan Gaji	1.000.000,00	0,00	333.475,00	333.475,00	(666.525,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	644.829.000,00	0,00	629.655.951,00	629.655.951,00	(15.173.049,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	104.869.000,00	0,00	102.146.098,00	102.146.098,00	(2.722.902,00)
5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	17.035.040.000,00	0,00	16.096.576.762,00	16.096.576.762,00	(938.463.238,00)
5 . 1 . 1 . 02 . 01	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	15.832.150.000,00	0,00	14.970.169.262,00	14.970.169.262,00	(861.980.738,00)
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif	1.202.890.000,00	0,00	1.126.407.500,00	1.126.407.500,00	(76.482.500,00)
5 . 1 . 1 . 06	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2.880.425.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.880.425.000,00)
5 . 1 . 1 . 06 . 33	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2.880.425.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.880.425.000,00)
5 . 1 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	49.765.585.060,00	0,00	44.293.608.289,22	44.293.608.289,22	(5.471.976.770,78)
5 . 1 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.240.106.500,00	0,00	1.099.111.000,00	1.099.111.000,00	(140.995.500,00)
5 . 1 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	368.713.500,00	0,00	298.043.000,00	298.043.000,00	(70.670.500,00)
5 . 1 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	732.000.000,00	0,00	710.568.000,00	710.568.000,00	(21.432.000,00)
5 . 1 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	48.143.000,00	0,00	0,00	0,00	(48.143.000,00)
5 . 1 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	91.250.000,00	0,00	90.500.000,00	90.500.000,00	(750.000,00)
5 . 1 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	60.000.000,00	0,00	11.352.500,00	11.352.500,00	(48.647.500,00)
5 . 1 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	60.000.000,00	0,00	11.352.500,00	11.352.500,00	(48.647.500,00)
5 . 1 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.117.000.000,00	0,00	1.911.435.181,22	1.911.435.181,22	(205.564.818,78)
5 . 1 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.000.000,00	0,00	452.784,00	452.784,00	(5.547.216,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	36.000.000,00	0,00	25.868.644,22	25.868.644,22	(10.131.355,78)
5 . 1 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	765.000.000,00	0,00	630.041.996,00	630.041.996,00	(134.958.004,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	300.000.000,00	0,00	272.923.377,00	272.923.377,00	(27.076.623,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service	962.000.000,00	0,00	952.728.880,00	952.728.880,00	(9.271.120,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan peralatan kantor	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(18.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan	30.000.000,00	0,00	29.419.500,00	29.419.500,00	(580.500,00)
5 . 1 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.290.750.000,00	0,00	690.750.000,00	690.750.000,00	(600.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(600.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	690.750.000,00	0,00	690.750.000,00	690.750.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.190.989.500,00	0,00	3.080.967.500,00	3.080.967.500,00	(110.022.000,00)
5 . 1 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.175.850.000,00	0,00	1.126.197.100,00	1.126.197.100,00	(49.652.900,00)
5 . 1 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	13.873.500,00	0,00	200.000,00	200.000,00	(13.673.500,00)
5 . 1 . 2 . 06 . 04	Belanja Penjilidan	8.266.000,00	0,00	0,00	0,00	(8.266.000,00)
5 . 1 . 2 . 06 . 05	Belanja dokumentasi dan publikasi	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.500.000,00)
5 . 1 . 2 . 06 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan lainnya	1.991.500.000,00	0,00	1.954.570.400,00	1.954.570.400,00	(36.929.600,00)
5 . 1 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	165.750.000,00	0,00	67.500.000,00	67.500.000,00	(98.250.000,00)
5 . 1 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	15.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	(3.000.000,00)

Printed by SimDa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 1 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	150.750.000,00	0,00	55.500.000,00	55.500.000,00	(95.250.000,00)
5 . 1 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	96.550.000,00	0,00	36.877.500,00	36.877.500,00	(59.672.500,00)
5 . 1 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	96.550.000,00	0,00	36.877.500,00	36.877.500,00	(59.672.500,00)
5 . 1 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	57.570.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	(7.570.000,00)
5 . 1 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	55.950.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	(5.950.000,00)
5 . 1 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.620.000,00)
5 . 1 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.425.050.000,00	0,00	1.333.933.975,00	1.333.933.975,00	(91.116.025,00)
5 . 1 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	579.650.000,00	0,00	547.530.775,00	547.530.775,00	(32.119.225,00)
5 . 1 . 2 . 12 . 06	Belanja Atribut Pakaian Dinas	845.400.000,00	0,00	786.403.200,00	786.403.200,00	(58.996.800,00)
5 . 1 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	60.000.000,00	0,00	59.220.000,00	59.220.000,00	(780.000,00)
5 . 1 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	60.000.000,00	0,00	59.220.000,00	59.220.000,00	(780.000,00)
5 . 1 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.750.000,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	(54.250.000,00)
5 . 1 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.500.000,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	(1.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.250.000,00	0,00	0,00	0,00	(53.250.000,00)
5 . 1 . 2 . 18	Belanja Pemeliharaan	10.297.025.520,00	0,00	9.659.308.450,00	9.659.308.450,00	(637.717.070,00)
5 . 1 . 2 . 18 . 03	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	364.783.000,00	0,00	362.870.000,00	362.870.000,00	(1.913.000,00)
5 . 1 . 2 . 18 . 06	Belanja Pemeliharaan	9.600.742.520,00	0,00	9.041.136.200,00	9.041.136.200,00	(559.606.320,00)
5 . 1 . 2 . 18 . 07	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	191.500.000,00	0,00	191.100.000,00	191.100.000,00	(400.000,00)
5 . 1 . 2 . 18 . 10	Belanja pemeliharaan komputer	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(75.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 18 . 12	Belanja pemeliharaan alat-alat komunikasi	65.000.000,00	0,00	64.202.250,00	64.202.250,00	(797.750,00)
5 . 1 . 2 . 19	Belanja Jasa Konsultansi	513.500.000,00	0,00	187.101.000,00	187.101.000,00	(326.399.000,00)
5 . 1 . 2 . 19 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(240.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 19 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	35.000.000,00	0,00	27.142.000,00	27.142.000,00	(7.858.000,00)
5 . 1 . 2 . 19 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	212.500.000,00	0,00	157.459.000,00	157.459.000,00	(55.041.000,00)
5 . 1 . 2 . 19 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	26.000.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	(23.500.000,00)
5 . 1 . 2 . 20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 20 . 05	Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 25	Belanja Honorarium PNS	4.206.170.000,00	0,00	1.594.730.000,00	1.594.730.000,00	(2.611.440.000,00)
5 . 1 . 2 . 25 . 01	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.915.520.000,00	0,00	1.594.730.000,00	1.594.730.000,00	(2.320.790.000,00)
5 . 1 . 2 . 25 . 02	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	124.950.000,00	0,00	0,00	0,00	(124.950.000,00)
5 . 1 . 2 . 25 . 07	Belanja Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	165.700.000,00	0,00	0,00	0,00	(165.700.000,00)
5 . 1 . 2 . 26	Belanja Honorarium Non PNS	24.965.373.540,00	0,00	24.485.821.183,00	24.485.821.183,00	(479.552.357,00)
5 . 1 . 2 . 26 . 02	Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24.965.373.540,00	0,00	24.485.821.183,00	24.485.821.183,00	(479.552.357,00)
5 . 2	**BELANJA MODAL**	13.944.313.000,00	0,00	11.879.368.112,00	11.879.368.112,00	(2.064.944.888,00)

Printed By SimDa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	5.099.233.000,00	0,00	3.712.595.512,00	3.712.595.512,00	(1.386.637.488,00)
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.262.450.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.262.450.000,00)
5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	1.262.450.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.262.450.000,00)
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	396.783.000,00	0,00	387.710.000,00	387.710.000,00	(9.073.000,00)
5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(7.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 11 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	389.783.000,00	0,00	387.710.000,00	387.710.000,00	(2.073.000,00)
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	95.500.000,00	0,00	90.240.000,00	90.240.000,00	(5.260.000,00)
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	45.500.000,00	0,00	43.540.000,00	43.540.000,00	(1.960.000,00)
5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	50.000.000,00	0,00	46.700.000,00	46.700.000,00	(3.300.000,00)
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	130.500.000,00	0,00	121.281.000,00	121.281.000,00	(9.219.000,00)
5 . 2 . 2 . 15 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	130.500.000,00	0,00	121.281.000,00	121.281.000,00	(9.219.000,00)
5 . 2 . 2 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	510.000.000,00	0,00	493.452.112,00	493.452.112,00	(16.547.888,00)
5 . 2 . 2 . 16 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	440.000.000,00	0,00	439.992.020,00	439.992.020,00	(7.980,00)
5 . 2 . 2 . 16 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	70.000.000,00	0,00	53.460.092,00	53.460.092,00	(16.539.908,00)
5 . 2 . 2 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	145.000.000,00	0,00	141.225.000,00	141.225.000,00	(3.775.000,00)
5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	50.000.000,00	0,00	49.250.000,00	49.250.000,00	(750.000,00)
5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	35.000.000,00	0,00	33.650.000,00	33.650.000,00	(1.350.000,00)
5 . 2 . 2 . 17 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	50.000.000,00	0,00	49.325.000,00	49.325.000,00	(675.000,00)
5 . 2 . 2 . 17 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	10.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	2.390.000.000,00	0,00	2.339.626.000,00	2.339.626.000,00	(50.374.000,00)
5 . 2 . 2 . 18 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	2.390.000.000,00	0,00	2.339.626.000,00	2.339.626.000,00	(50.374.000,00)
5 . 2 . 2 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	120.000.000,00	0,00	90.665.000,00	90.665.000,00	(29.335.000,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM	120.000.000,00	0,00	90.665.000,00	90.665.000,00	(29.335.000,00)

Printed By SimDa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	49.000.000,00	0,00	48.396.400,00	48.396.400,00	(603.600,00)
5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	49.000.000,00	0,00	48.396.400,00	48.396.400,00	(603.600,00)
5 . 2 . 3	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	8.845.080.000,00	0,00	8.166.772.600,00	8.166.772.600,00	(678.307.400,00)
5 . 2 . 3 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	342.672.000,00	0,00	333.833.000,00	333.833.000,00	(8.839.000,00)
5 . 2 . 3 . 01 . 13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	185.322.000,00	0,00	183.855.000,00	183.855.000,00	(1.467.000,00)
5 . 2 . 3 . 01 . 21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	157.350.000,00	0,00	149.978.000,00	149.978.000,00	(7.372.000,00)
5 . 2 . 3 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	8.502.408.000,00	0,00	7.832.939.600,00	7.832.939.600,00	(669.468.400,00)
5 . 2 . 3 . 09 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	4.401.247.000,00	0,00	4.277.490.000,00	4.277.490.000,00	(123.757.000,00)
5 . 2 . 3 . 09 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	4.101.161.000,00	0,00	3.555.449.600,00	3.555.449.600,00	(545.711.400,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(56.991.379.060,00)	0,00	(74.006.350.457,22)	(74.006.350.457,22)	(17.014.971.397,22)
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(56.991.379.060,00)	0,00	(74.006.350.457,22)	(74.006.350.457,22)	(17.014.971.397,22)

Printed By SimDA